



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### TELAAH LITERATUR

#### A. Kinerja Keuangan

*Financial performance is a measure of a company's ability to generate income over a given period of time* ([www.qfinance.com](http://www.qfinance.com)). Kinerja keuangan menunjukkan gambaran hasil kegiatan atau aktivitas ekonomi perusahaan pada periode tertentu dalam mencapai keuntungan yang efektif dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan bisa menggunakan analisis keuangan (*financial analysis*). Analisis keuangan menurut Subramanyam (2009) adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisa posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan, serta untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Analisis finansial terdiri dari tiga macam analisis yaitu analisis profitabilitas, analisis risiko, dan analisis sumber dan penggunaan dana. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis profitabilitas.

Analisis profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas bisa diperoleh dengan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Seluruh rasio profitabilitas memiliki makna yang sama yaitu semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan juga semakin baik (Gitman, 2012).

Kieso (2013) memberikan penjelasan mengenai rasio profitabilitas, yaitu:

*Profitability ratios measure the income or operating success of a company for a given period of time. Income, or the lack of it, affects the company's ability to obtain debt and equity financing. It also affects the company's liquidity position and the company's ability to grow. As a consequence, both creditors and investors are interested in evaluating earning power-profitability. Analysts frequently use profitability as the ultimate test of management's operating effectiveness.*

Penjelasan mengenai profitabilitas tersebut dapat diartikan bahwa rasio profitabilitas mengukur pendapatan dan kesuksesan dari kegiatan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Pendapatan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari hutang dan ekuitas, juga akan mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Sebagai akibatnya, kreditur dan investor tertarik untuk mengevaluasi *earning power-profitability*. Analisis seringkali menggunakan profitabilitas sebagai pengujian efektivitas tindakan operasional manajemen.

Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh *return* yang memadai dibanding dengan risikonya (Prihadi, 2008). Kemudian Prihadi (2008) menyatakan bahwa basis perhitungan profitabilitas ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan pendapatan (penjualan), *return on sales (ROS)*
2. Tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan penggunaan aset, *return on asset (ROA)*

3. Tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan modal sendiri, *return on equity (ROE)*.

Kieso (2013) membagi rasio profitabilitas menjadi 7 pengukuran yaitu:

1. *Profit margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba per mata uang penjualan yang dinyatakan dalam persentase.

2. *Asset turnover*

Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.

3. *Return on assets*

Rasio ini mengukur profitabilitas perusahaan yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan.

4. *Return on ordinary shareholders' equity*

Rasio ini mengukur profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham biasa. Maka rasio ini mengukur profitabilitas perusahaan yang diperoleh dari investasi pemegang saham biasa. *ROE* dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}}{\text{Average Ordinary Shareholders' Equity}}$$

5. *Earnings Per Share (EPS)*

Rasio ini mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa perusahaan.

#### 6. *Price-earnings ratio*

Rasio ini mengukur rasio dari harga pasar setiap saham biasa dengan pendapatan per lembar saham biasa.

#### 7. *Payout ratio*

Rasio ini mengukur persentase dari laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen kas.

Dari ketujuh jenis pengukuran profitabilitas, rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Equity*. *ROE* mengukur tingkat pengembalian dari ekuitas perusahaan, sehingga rasio ini bisa menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki, dan diukur dengan cara membagi laba bersih perusahaan setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham dalam satu periode dengan total ekuitas perusahaan (Ross, 2012). Laba bersih diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan. Weygandt (2011) menyebutkan bahwa dalam laporan laba rugi, umumnya perusahaan akan menyajikan beberapa atau seluruh komponen berikut ini:

##### 1. *Sales or Revenue Section*

Bagian ini berisi penjualan, potongan harga, *allowances*, pengembalian, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penjualan. Pada akhir bagian ini akan diperoleh penjualan bersih.

##### 2. *Cost of Goods Sold Section*

Bagian ini menunjukkan beban pokok penjualan yang terjadi untuk menghasilkan penjualan.

**Gross Profit.** Merupakan penjualan bersih dikurang beban pokok penjualan.

3. *Selling Expenses*

Bagian ini menyajikan beban-beban yang dihasilkan oleh usaha perusahaan dalam menghasilkan penjualan.

4. *Administrative or General Expenses*

Bagian ini menyajikan beban dari administrasi dan umum

5. *Other Income and Expense*

Bagian ini mencakup transaksi-transaksi lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam kategori penjualan atau penghasilan dan kategori beban. *Item* seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset jangka panjang (*sales of long-lived assets*), penurunan nilai aset, dan beban restrukturisasi (*restructuring charges*) disajikan pada bagian ini. Seringkali pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga juga disajikan di bagian ini.

**Income from Operations.** Penghasilan perusahaan yang diperoleh dari aktivitas operasional normal.

6. *Financing Costs*

Merupakan bagian terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan, yang selanjutnya disebut *interest expense* atau beban bunga.

**Income before Income Tax.** Laba perusahaan sebelum pajak penghasilan.

#### 7. *Income Tax*

Bagian ini menyajikan besarnya pajak yang dipungut atas laba sebelum pajak penghasilan.

***Income from Continuing Operations.*** Laba perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian atas aktivitas operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian atas aktivitas operasi yang dihentikan, maka bagian ini tidak disajikan dan nilainya langsung disajikan sebagai laba bersih.

#### 8. *Discontinued Operations*

Bagian ini menyajikan keuntungan atau kerugian atas penghentian (*disposition*) komponen perusahaan.

***Net Income.*** Merupakan jumlah bersih dari kinerja perusahaan selama satu periode.

#### 9. *Non-Controlling Interest*

Bagian ini menyajikan pengalokasian laba bersih untuk pemegang saham utama dan juga untuk kepentingan non-pengendali (bisa juga disebut kepentingan minoritas).

#### 10. *Earning per Share*

Bagian ini menyajikan laba bersih per saham.

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan informasi-informasi yang perlu disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. IAI (2012) mengemukakan laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut untuk periode:

1. Pendapatan
2. Biaya keuangan
3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
4. Beban pajak
5. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
  - a) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan
  - b) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan
6. Laba rugi
7. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam nomor (8))
8. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
9. Total laba rugi komprehensif

Selanjutnya, IAI (2012) juga menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan pos-pos di bawah ini dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai alokasi laba rugi untuk periode:

1. Laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
  - a) Kepentingan nonpengendali
  - b) Pemilik entitas induk

2. Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

- a) Kepentingan nonpengendali
- b) Pemilik entitas induk

Jika perusahaan memiliki saham preferen, maka dividen preferen harus dikeluarkan dari total laba bersih untuk memperoleh nominal laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa (Kieso, 2013). Hal ini dikarenakan pemegang saham preferen memperoleh *return* atau pengembalian yang tetap, tanpa melihat kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan untuk pemegang saham biasa tingkat *return* akan bergantung pada kinerja keuangan perusahaan pada periode yang bersangkutan. Semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan, maka *return* yang diterima akan semakin tinggi pula. Hal serupa juga dikemukakan Subramanyam (2009) bahwa pemegang saham preferen biasanya menerima dividen yang tetap sedangkan pemegang saham biasa tidak memperoleh *return* atau pengembalian yang tetap. Pemegang saham biasa bisa menerima bagian laba perusahaan apabila seluruh sumber dana lainnya telah dibayarkan. Oleh karena itu, *ROE* sangat penting untuk pemegang saham biasa.

*ROE* dihitung dengan membagi laba bersih sebelum pajak dengan total ekuitas perusahaan. IAI (2012) mengemukakan bahwa perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut, terkait dengan ekuitas, dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan:

1. Untuk setiap jenis saham:

- a) Jumlah saham modal dasar
- b) Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh
- c) Nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal
- d) Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode
- e) Hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal
- f) Saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi
- g) Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah persyaratan.

2. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas.

Subramanyam (2009) mendefinisikan *ROE* sebagai laba bersih dikurang dividen preferen dibagi rata-rata saham biasa. Saham biasa merupakan total modal pemegang saham dikurang saham preferen. Saham preferen dikeluarkan dari perhitungan karena, dilihat dari sudut pandang pemegang saham biasa, saham preferen memiliki klaim tetap terhadap *net assets* dan arus kas perusahaan, layaknya hutang.

Subramanyam (2009) kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai saham biasa:

*Common equity can alternatively be defined as equal to total assets less debt and preferred stock. The proportion of debt and equity financing of assets is a capital structure decision that each company must make. The amount of equity in the capital structure, and thus the amount of equity used in the computation of return on equity, is, therefore, a function of the degree to which the company is financed with debt (that is, more debt means less equity). Likewise, the numerator (net income) is impacted by the amount of interest expense that the company must pay on its debt.*

Artinya, saham biasa juga bisa didefinisikan sebagai total aset dikurangi hutang dan saham preferen. Proporsi dari pendanaan hutang dan modal dalam aset merupakan keputusan struktur modal yang perlu dibuat oleh setiap perusahaan. Jumlah ekuitas dalam struktur modal, dan juga jumlah modal yang digunakan dalam perhitungan *return on equity*, merupakan ukuran sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Demikian juga numerator (laba bersih) dipengaruhi oleh jumlah beban bunga yang harus dibayar perusahaan atas hutangnya.

Ross (2012) mengemukakan pendapatnya mengenai *ROE*, “*Because benefiting shareholders is our goal, ROE is, in an accounting sense, the true bottom-line measure of performance*”, yang berarti perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan kepada para pemegang saham, maka dari itu, dalam konteks akuntansi, *ROE* merupakan dasar dari pengukuran kinerja.

## **B. Stakeholders Theory**

*Stakeholders theory* berpandangan bahwa perusahaan memerlukan dukungan *stakeholders* untuk menjaga eksistensi perusahaan (Djuitaningsih dan

Ristiawati, 2011). Teori ini juga berpendapat bahwa seluruh *stakeholders* memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil oleh perusahaan (Freeman, 1984 dalam Burhan dan Rahmanti, 2012). Perusahaan membutuhkan persetujuan *stakeholders* di dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan.

Teori *stakeholders* dikembangkan oleh Freeman pada tahun 1984. Freeman mendefinisikan *stakeholders* sebagai, “*any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s objectives is affected by the achievement of an organization’s objectives.*” (Freeman, 1984 dalam Burhan dan Rahmanti, 2012). Kinicki (2009) juga memiliki pendapat yang hampir serupa dengan Freeman terkait *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas perusahaan. Selain dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, *stakeholders* juga bisa mempengaruhi aktivitas perusahaan. *Stakeholders* mampu mempengaruhi aktivitas perusahaan karena dukungan-dukungan dari *stakeholders* diperlukan perusahaan demi kelangsungan kegiatan bisnisnya.

Kinicki (2009) kemudian membagi *stakeholders* ke dalam dua kelompok yaitu:

1. *Internal Stakeholders*

*Stakeholders* internal adalah pihak-pihak internal perusahaan yang terdiri dari:

- 1) Karyawan

Banyak pihak yang berpendapat bahwa karyawan merupakan sumber daya yang paling penting dimiliki oleh perusahaan. Manajer

disarankan memiliki hubungan yang baik dengan karyawan-karyawannya. Hubungan buruk atau konflik antara manajer dan karyawan bisa menurunkan performa perusahaan dan pada akhirnya akan merugikan banyak kepentingan pihak lain.

## 2) Pemilik

Pemilik adalah seluruh pihak yang berhak mengklaim perusahaan tersebut sebagai propertinya yang legal. Pemegang saham atau investor termasuk kategori pemilik karena mereka membeli sejumlah saham milik perusahaan yang diperdagangkan di bursa.

## 3) *Board of Directors (BoD)*

*BoD* adalah sekelompok orang, atau yang biasa disebut dewan, yang dipilih oleh investor. Tugas utama *BoD* adalah memastikan kepada para investor bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan keinginan investor. Para anggota dewan direksi memiliki peran yang penting di dalam merumuskan *strategic goals* perusahaan dan juga di dalam menyetujui keputusan-keputusan besar (*major decisions*) serta menentukan besarnya gaji *top management*.

## 2. *External Stakeholders*

*Stakeholders* eksternal adalah sekelompok orang atau pihak-pihak di luar lingkungan perusahaan yang dipengaruhi oleh perusahaan. *External stakeholders* terdiri dari dua kelompok yaitu:

1) *Task Environment*

*Task Environment* atau lingkungan tugas merupakan lingkungan luar perusahaan yang memiliki hubungan paling dekat dengan perusahaan dibandingkan *general environment*. Pihak-pihak yang termasuk lingkungan tugas adalah *supplier*, *customer*, kompetitor, distributor, organisasi buruh, pemerintahan, lembaga keuangan, komunitas lokal, *strategic allies*, media massa, dan *special-interest groups*.

2) *General Environment*

*General Environment* atau *macroenvironment* atau lingkungan umum adalah faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan dan bisa mempengaruhi *task environment*. Lingkungan umum terdiri dari faktor ekonomi, teknologi, *sociocultural*, demografik, *political-legal*, dan internasional.

Perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan *stakeholders*-nya dengan cara mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholders*, terutama *stakeholders* yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan (Chariri dan Ghazali, 2007 dalam Pratiwi, 2012). Hubungan baik antara perusahaan dan *stakeholders* diharapkan bisa membantu perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan di publik. Peningkatan citra perusahaan selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, salah satunya adalah peningkatan profitabilitas.

### C. Konsep *Ecoefficiency*

Hansen (2007) memberi pernyataan terkait dengan *ecoefficiency*, yaitu:

*Ecoefficiency essentially maintains that organizations can produce more useful goods and services while simultaneously reducing negative environmental impacts, resource consumption, and costs. This concept conveys at least three important messages. First, improving ecological and economic performance can and should be complementary. Second, improving environmental performance should no longer be viewed as a matter of charity and goodwill but rather as a matter of competitiveness. Third, ecoefficiency is complementary to and supportive of sustainable development. Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa *ecoefficiency* pada dasarnya mengarahkan bahwa perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat, dan di saat yang bersamaan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya, dan biaya. Konsep ini menyatakan bahwa peningkatan kinerja ekologi dan ekonomi harus dilakukan secara seimbang, peningkatan kinerja lingkungan tidak boleh dilihat semata-mata sebagai suatu bentuk sumbangan atau *goodwill* melainkan sebagai bentuk daya saing, dan *ecoefficiency* mendukung perkembangan yang berkelanjutan. Perkembangan yang berkelanjutan diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan saat ini tanpa harus mengkhawatirkan kemampuan generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan nantinya.

Ada 4 tujuan utama perusahaan dalam menerapkan *ecoefficiency*, yaitu mengurangi penggunaan sumber daya, mengurangi dampak pada lingkungan, meningkatkan nilai produk, dan mengurangi kewajiban untuk memperbaiki lingkungan. Supaya tujuan tersebut bisa tercapai, perusahaan

bisa melakukan beberapa cara untuk memperbaiki *ecoeficiency*. Pertama, perusahaan dapat melakukan pengembangan dan inovasi terhadap proses bisnis (*process improvement and innovation*). Perubahan proses ini harus fokus pada pengurangan biaya dan peningkatan kinerja lingkungan. Kedua, perusahaan dapat mengevaluasi kembali produk-produknya (*revalorize by-products*). Evaluasi ini termasuk cara-cara yang dilakukan perusahaan agar bahan sisa dapat diubah menjadi produk yang berguna. Ketiga, perusahaan dapat mendesain ulang produknya (*product redesign*). Produk bisa didesain ulang supaya jumlah dan jenis bahan baku yang digunakan menjadi lebih sedikit, bahan berbahaya dapat diminimalisir, dan lebih mudah untuk didaur ulang. Cara keempat yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan *ecoeficiency* adalah dengan mencari cara baru yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan (*new ways of meeting customer needs*). Perusahaan perlu mencari pasar baru dan membentuk kembali permintaan dan penawaran (Mowen, 2011).

*Ecoeficiency* menunjukkan bahwa efisiensi dapat bertambah apabila perusahaan melakukan peningkatan kinerja lingkungan. Ada enam alasan yang melandasi pemikiran ini. Pertama, adanya permintaan akan produk yang bersih (proses pengolahannya tidak merusak lingkungan dan penggunaannya juga ramah lingkungan) dari konsumen. Kedua, pekerja lebih memilih untuk bekerja di perusahaan yang memiliki pertanggung jawaban terhadap lingkungan sehingga produktivitas bisa bertambah. Ketiga, perusahaan yang bertanggung jawab pada lingkungan biasanya memperoleh manfaat-manfaat

seperti biaya modal yang berkurang dan biaya asuransi yang rendah pula. Keempat, kinerja lingkungan yang baik juga akan memberikan manfaat sosial seperti manfaat terhadap kesehatan manusia. Kelima, adanya fokus pada perkembangan kinerja lingkungan akan menyadarkan manajer untuk bisa berinovasi dan mencari peluang baru. Hal ini bisa berdampak pada munculnya pasar baru untuk hasil produksi yang tadinya diklasifikasikan sebagai barang sisa. Keenam, menurunnya biaya lingkungan dapat menambah keunggulan kompetitif perusahaan (Hansen, 2007).

Hansen (2007) selanjutnya menyatakan bahwa faktor menurunnya biaya lingkungan merupakan faktor yang paling penting. Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan (Susenohaji, 2003 dalam Fitriani, 2013). Pengetahuan mengenai biaya lingkungan beserta penyebabnya dapat berujung pada tindakan mendesain ulang proses, dimana penggunaan material dan polutan yang dikeluarkan akan dikurangi (Hansen, 2007).

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu (Hansen, 2007):

1. *Environmental prevention costs*

Biaya ini merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang dapat merusak lingkungan.

## 2. *Environmental detection costs*

Biaya ini merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku umum.

## 3. *Environmental internal failure costs*

Biaya ini merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena limbah dan sampah telah dihasilkan tetapi tidak dibuang ke lingkungan.

## 4. *Environmental external failure costs*

Biaya ini merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. *Realized external failure costs* merupakan biaya yang terjadi dan dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan *unrealized external failure costs (societal costs)* merupakan biaya yang disebabkan oleh perusahaan tetapi terjadi dan dibayarkan oleh pihak-pihak di luar perusahaan.

### **D. Kinerja Lingkungan**

Salah satu faktor utama yang mendasari konsep perkembangan yang berkelanjutan adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan menurut Suratno et al. (2006) dalam Fitriani (2013) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau *green*. Kinerja lingkungan perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan di dalam menjaga relasi yang baik dengan *stakeholders*-nya. Januarti dan Apriyanti (2005) dalam

Djuitaningsih dan Ristiawati (2011) mengemukakan beberapa alasan yang mendorong perusahaan untuk lebih memerhatikan lingkungan yaitu:

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.
2. Era globalisasi mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan.
3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan.
4. LSM dan pecinta lingkungan semakin vokal dalam melakukan kritik terhadap perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Isu-isu mengenai lingkungan turut menjadikan kinerja lingkungan perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pembuatan keputusan berinvestasi. Deegan dan Rankin (1997) dalam Burritt (2012) mengemukakan bahwa informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan merupakan hal yang penting atau material bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Pengukuran kinerja lingkungan perusahaan bisa melalui prestasi perusahaan mengikuti program PROPER. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) merupakan metode pengukuran yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku. PROPER merupakan program sukarela, artinya Kementerian

Lingkungan Hidup tidak mewajibkan setiap perusahaan untuk menjadi peserta PROPER. Namun sebenarnya, PROPER merupakan langkah terpadu Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam melaksanakan undang-undang mengenai lingkungan hidup, salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Amdal merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Perusahaan peserta PROPER tidak terbatas pada perusahaan publik saja, melainkan semua perusahaan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan peduli dengan citra atau reputasi.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang mekanisme dan Kriteria penilaian PROPER. Kementerian Lingkungan Hidup melalui publikasi hasil PROPER 2012 membagi kriteria penilaian PROPER menjadi dua, yaitu:

1. Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkat biru, merah, dan hitam. Kriteria ketaatan pada dasarnya adalah penilaian ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah peraturan tentang:
  - 1) Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan
  - 2) Pengendalian pencemaran air
  - 3) Pengendalian pencemaran udara

- 4) Pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)
  - 5) Pengendalian pencemaran air laut
  - 6) Kriteria kerusakan lingkungan
2. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) untuk pemingkatan hijau dan emas. Aspek yang dinilai adalah:
- 1) Sistem manajemen lingkungan (SML)
  - 2) Efisiensi energi
  - 3) Penurunan emisi
  - 4) Pemanfaatan dan pengurangan limbah B3
  - 5) Penerapan 3R (*Reuse, Recycle, dan Recovery*) limbah padat non B3
  - 6) Konservasi air dan penurunan beban pencemaran air
  - 7) Perlindungan keanekaragaman hayati
  - 8) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Peserta PROPER tiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2002 peserta PROPER hanya 85 perusahaan sedangkan tahun 2011 peserta PROPER mencapai angka 995 perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan sebanyak 2.000 perusahaan akan menjadi peserta PROPER pada periode 2013-2014. Penetapan target ini didasari oleh harapan meningkatnya kesadaran pebisnis terkait pengelolaan lingkungan hidup. Berikut ini hasil peringkat PROPER periode 2009-2011: ([proper.menlh.go.id](http://proper.menlh.go.id)).

Tabel 2.1 Hasil Peringkat PROPER Periode 2009-2011

Peringkat	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Emas	1	2	5
Hijau	41	54	106
Biru	399	435	552
Merah	48	152	283
Hitam	56	47	49
<b>JUMLAH PERUSAHAAN</b>	<b>545</b>	<b>690</b>	<b>995</b>

Hasil PROPER akan diumumkan secara rutin oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Hasil tersebut bisa membantu masyarakat untuk menilai kontribusi suatu perusahaan terhadap lingkungan hidup. Perusahaan yang memiliki prestasi baik akan memperoleh apresiasi lebih dari masyarakat.

Hasil peringkat PROPER menjadi 5 warna, yakni ([proper.menlh.go.id](http://proper.menlh.go.id)):

1. Emas: Perusahaan secara konsisten telah menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
2. Hijau: Perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik.

3. Biru: Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Merah: Upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hitam: Perusahaan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat peringkat warna yang ada (tertinggi: Emas; terendah: Hitam).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan yang berperingkat merah akan dimasukkan ke dalam pembinaan untuk perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang berperingkat hitam akan langsung diserahkan kepada proses penegakan hukum. Peraturan ini bertujuan supaya perusahaan bisa lebih meningkatkan kinerja lingkungan di periode-periode berikutnya.

## E. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan yang memperoleh skor PROPER Emas atau Hijau tentu akan mendapatkan apresiasi yang lebih baik dari masyarakat. Djuitaningsih dan Ristiawati (2011) menyatakan bahwa semakin baik kinerja lingkungan perusahaan maka akan berdampak baik pada perkembangan kinerja finansial perusahaan jangka panjang, dimana akan terjadi peningkatan transaksi perusahaan yang berujung pada peningkatan *ROE* satu tahun kemudian.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Fitriani (2013) dan Purnomo dan Widianingsih (2012) menemukan hubungan signifikan positif antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Iwata dan Okada (2010) juga menemukan pengaruh signifikan positif antara kinerja lingkungan dengan *ROE*. Kinerja lingkungan yang berupa pengurangan gas rumah kaca mampu meningkatkan *ROE* dalam jangka panjang. Namun, Rakhiemah dan Agustia (2009) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan paparan mengenai kinerja lingkungan tersebut, maka hipotesis alternatif pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>1</sub>: Kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Equity (ROE)*.

## F. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Nickels (2008) secara sederhana mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai *the concern businesses have for the welfare of society*. Perusahaan diharapkan tidak hanya membahagiakan investornya, tetapi juga membahagiakan seluruh *stakeholders*-nya. *CSR* menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar menciptakan profit, tapi juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan (Dwi dan Maksum, 2008 dalam Wijayanti et al., 2011).

Pengertian *CSR* secara lebih detil dikemukakan oleh *World Business Council for Sustainable Development*, yaitu *“the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large”*. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan secara terus menerus dan tidak hanya terbatas pada karyawan perusahaan saja, tetapi juga terhadap masyarakat secara umum.

Kotler (2005) dalam Asmaranti (2011) mendefinisikan *CSR* sebagai *“a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources”*, yang artinya *CSR* merupakan komitmen dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui kebijakan dari praktik bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Kunci dari pengertian ini adalah *discretionary* atau kebijakan. Kebijakan yang dimaksud bukan mengenai aktivitas bisnis yang

diamanatkan oleh hukum atau beretika untuk lingkungan, melainkan mengenai komitmen sukarela perusahaan dalam memilih dan mengimplementasikan praktik bisnis tersebut. Istilah kesejahteraan komunitas (*community well-being*) dalam definisi ini termasuk isu manusia atau masyarakat dan juga lingkungan.

Elkington (2010) dalam Asmaranti (2011) menegaskan bahwa pada prinsipnya tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada 3 (tiga) aspek yang dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” yang harus dijadikan sebagai acuan dalam aktivitas suatu perusahaan. *Triple bottom line* meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “*triple P*” yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Bila dikaitkan antara “*triple bottom line*” dengan “*triple P*” dapat disimpulkan bahwa *profit* sebagai wujud aspek ekonomi, *planet* sebagai wujud aspek lingkungan, dan *people* sebagai wujud aspek sosial. *Global Compact Initiative* menyatakan bahwa untuk mencari laba (*profit*) harus menyejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*) ini (Wahyudi, 2008 dalam Asmaranti, 2011).

Contoh perusahaan di Indonesia yang telah melakukan aktivitas CSR adalah PT Djarum. PT Djarum sudah lebih dari 20 tahun melakukan kegiatan CSR di bidang pendidikan yang memberikan kontribusi bagi kemajuan

kualitas generasi muda, khususnya mahasiswa. Program *CSR* tersebut yang kini disebut dengan nama program Djarum Beasiswa Plus telah diberikan kepada lebih dari 6.300 mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di 24 propinsi di Indonesia. Pemberian berbagai pelatihan *soft skill* dan pengembangan karakter menjadi kekhas-an dari program Djarum Beasiswa Plus. Pelatihan ini meliputi tiga aspek yakni, *outbond*, *leadership program*, dan *practical skills and entrepreneurship* ([www.djarumbeasiswaplus.org](http://www.djarumbeasiswaplus.org)).

Selain Djarum, Unilever juga turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu aktivitas *CSR*, yaitu melalui Yayasan Unilever Indonesia. Pada tahun 2009, Unilever turut menjadi penggagas *Project Laser Beam*, suatu kemitraan publik-swasta internasional yang melibatkan *UN-World Food Programme* dan organisasi sektor swasta. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat pemberantasan masalah gizi anak, khususnya anak usia bawah lima tahun (balita) dan juga faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dan kebersihan, ketersediaan air dan mata pencaharian di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2011, Unilever Indonesia mengembangkan serangkaian alat bantu edukasi yang bahan-bahannya telah diuji untuk memastikan bahwa media tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kegiatan pendidikan kesehatan dan kebersihan di sekolah dasar terpilih pada tahun 2012 ([www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)).

Aktivitas *CSR* masih terus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nickels et al. (2008) mengemukakan bahwa kritik seputar *CSR* terjadi karena

banyak ekonom berpendapat tugas utama seorang manajer adalah bersaing dan memenangi pasar, bukan melakukan aktivitas lain yang tidak akan memberikan *profit* kepada investor. Di sisi lain, para pendukung *CSR* berpendapat bahwa eksistensi suatu bisnis dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung. Lingkungan menyediakan banyak sumber daya alam dan manusia untuk bisa dimanfaatkan oleh pebisnis, sehingga sudah sewajarnya perusahaan memberikan balas jasa kepada lingkungan. Pendukung *CSR* juga berargumen *CSR* akan memberikan lebih banyak uang kepada investor dalam jangka panjang.

Pro dan kontra seputar *CSR* didasari oleh dua pandangan yang saling bertolak belakang (Schermerhorn, 2010), yaitu:

1. Pandangan Klasik

Pandangan klasik berpendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab manajemen dalam menjalankan bisnis adalah memaksimalkan laba. Kewajiban utama dari manajemen hanya kepada pemilik dan pemegang saham. Pandangan ini mengambil perspektif *stakeholders* yang sempit dan menaruh fokus pada kinerja keuangan saja.

2. Pandangan *Socioeconomic*

Pandangan *socioeconomic* menyatakan bahwa manajemen di perusahaan manapun harus memperhatikan kesejahteraan sosial yang lebih luas, tidak hanya laba perusahaan. Pandangan ini mengambil perspektif *stakeholders* yang lebih luas dan fokusnya tidak hanya pada kinerja keuangan, tetapi juga kinerja lingkungan dan sosial.

Adanya pro dan kontra seputar CSR mengacu pada *stakeholders theory*. Pratiwi (2012) mengemukakan salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan *stakeholders* adalah melalui aktivitas CSR. Pelaksanaan aktivitas CSR diharapkan mampu mengakomodasi keinginan *stakeholders* sehingga akan menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholders*. Ambadar (2008) turut mendukung pendapat Pratiwi (2012). Ambadar (2008) dalam Wijayanti et al. (2011) menyebutkan beberapa motivasi dan manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan CSR, yakni:

1. Perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempedulikan akibat dari perilaku buruk perusahaan.
2. Kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan dimana perusahaan bekerja.
3. Perusahaan mendapat rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.
4. Perilaku etis perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar sehingga dapat beroperasi secara lancar.

Di Indonesia, pelaksanaan aktivitas CSR oleh perusahaan, terutama perseroan terbatas, sudah diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 ayat (1). Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Perseroan

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa, “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. *Stakeholders* bisa mengetahui suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas *CSR* salah satunya adalah melalui pengungkapan aktivitas *CSR* oleh perusahaan (*CSR disclosure*).

Pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan yang didasarkan pada standar (Wijayanti et al., 2011) atau pengungkapan wajib (Karuniawan dan Nugrahanti, 2012). Karuniawan dan Nugrahanti (2012) menjelaskan lebih lanjut bahwa pengungkapan aktivitas *CSR* termasuk pengungkapan sukarela. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan *CSR*. Bagi perusahaan yang aktivitasnya tidak berhubungan dengan sumber daya alam, aktivitas *CSR* dilakukan berdasarkan kesadaran perusahaan, bukan karena adanya peraturan yang berlaku. Peraturan ini sejalan dengan pernyataan IAI (2012) melalui PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan, yang menyatakan bahwa,

*Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap*

*karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.*

Aktivitas CSR perlu diungkapkan baik di dalam laporan tahunan atau di dalam laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Wijayanti et al., 2011). Namun demikian, Titisari et al. (2010) mengungkapkan bahwa hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005 dalam Titisari et al., 2010). Pengungkapan aktivitas CSR dapat membantu menjaga reputasi perusahaan atau agar perusahaan bisa tetap bertahan (*survive*) dan terhindar dari berbagai bentuk penolakan masyarakat (Lindrianasari, 2009). Sehingga pengungkapan aktivitas CSR diharapkan mampu membantu perusahaan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terkait dengan pelaksanaan program-program sosial dan lingkungan sesuai dengan harapan masyarakat.

Mirfazli (2008) berpendapat bahwa pengungkapan aktivitas CSR salah satunya didasari oleh teori legitimasi. Perusahaan akan melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu dan kemudian mengungkapkannya dengan tujuan untuk memperoleh legitimasi dari lingkungan sekitar perusahaan dan juga

merupakan strategi untuk mempertahankan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak eksternal (terutama *stakeholders*).

Hackston dan Milne (1999) dalam Sembiring (2005) mengemukakan tujuh indikator dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Ketujuh indikator dibagi ke dalam 90 *item* pengungkapan. Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan, perlu penyesuaian terhadap ke-90 *item* supaya bisa diaplikasikan di Indonesia. Dua belas *item* dihapus karena kurang sesuai untuk diterapkan di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 *item* pengungkapan (Sembiring, 2005). Masing-masing indikator memiliki *item-item* yang berbeda satu sama lain yang perlu diungkapkan di dalam *CSR Disclosure*.

Tiap sektor industri memiliki total *item* pengungkapan yang berbeda-beda. Sektor industri dikelompokkan ke dalam 12 sektor, yakni (1) *agriculture forestry and fishing*; (2) *animal feed and husbandry*; (3) *mining and mining service*; (4) *construction*; (5) *manufacturing*; (6) *transportation service*; (7) *communication*; (8) *whole sale and retail trade*; (9) *banking, credit agencies other than bank, securities, insurance, and real estate*; (10) *hotel and travel service*; (11) *holding and other investment*; dan (12) *others* (Sembiring, 2005). Total *item* yang perlu diungkapkan masing-masing industri bervariasi antara 63 *item* hingga 78 *item*. Penelitian ini menggunakan

sektor industri manufaktur yang memerlukan pengungkapan sebanyak 78 *item*.

Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan *CSR index (CSRI)*. *CSRI* merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan atas pengungkapan sosial yang dilakukannya (Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Rakhiemah dan Agustia, 2009). Penghitungan *CSRI* menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap *item CSR* dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et al., 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya, nilai setiap *item* akan dijumlahkan untuk memperoleh total keseluruhan nilai setiap perusahaan. Rumus perhitungan *CSRI* menurut Haniffa et al. (2005) dalam Sayekti dan Wondabiyo (2007) yang digunakan dalam penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009) adalah sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRI_j$  : *Corporate Social Responsibility Index* Perusahaan j

$n_j$  : Jumlah *item* untuk perusahaan j,  $n_j = 78$  *item*

$\sum X_{ij}$  : Jumlah *item CSR* yang diungkapkan perusahaan j selama periode i

Dengan demikian,  $0 \leq CSRI_j \leq 1$

## G. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian Aras et al. (2009) dalam Adhiwardana dan Daljono (2013) mengindikasikan aktivitas *CSR* akan menjadi elemen sebagai strategi perusahaan yang akan memberikan kontribusi kepada manajemen resiko dan akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan sehingga akan terjadi peningkatan *ROE* perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh *CSR* terhadap kinerja keuangan. Penelitian oleh Wijayanti et al. (2011) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara *CSR* dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan *ROE*. Hasil penelitian Daud dan Amri (2008) menunjukkan *CSR* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Burhan dan Rahmanti (2012), Adhiwardana dan Daljono (2013), dan Pratiwi (2012) juga menemukan adanya pengaruh signifikan antara *CSR Disclosure* terhadap kinerja perusahaan. Menurut Chung et al. (2008) dalam Wijayanti et al. (2011), perusahaan yang mengungkapkan *CSR* lebih banyak cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan *CSR*.

Hasil penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Karuniawan dan Nugrahanti (2012) yang tidak menemukan adanya hubungan antara pengungkapan *CSR* dengan kinerja keuangan. Begitu pula dengan hasil penelitian Yaparto et al. (2013) dan Titisari et al. (2010). Hasil penelitian Titisari et al. (2010) mengindikasikan bahwa isu *CSR* merupakan hal yang relatif baru di Indonesia dan kebanyakan investor memiliki persepsi yang

rendah terhadap hal tersebut. Crisostomo et al. (2007) dalam Wijayanti et al. (2011) juga berpendapat bahwa *CSR* tidak mampu menaikkan nilai perusahaan, begitu juga dengan investasi dan pengeluaran perusahaan.

Berdasarkan paparan mengenai *CSR* maka hipotesis alternatif kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>2</sub>: *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan *Return On Equity (ROE)*.

#### **H. Pengaruh Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan**

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengujian secara simultan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap kinerja keuangan. Fitriani (2013) melalui penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kinerja lingkungan dan biaya lingkungan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009) menemukan bahwa *CSR Disclosure* dan kinerja lingkungan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan *return* industri. Hal ini diduga terjadi karena perilaku para pelaku pasar modal di Indonesia yang sangat berhati-hati dalam menentukan keputusannya sehingga variabel kinerja lingkungan saja ataupun *CSR Disclosure* saja yang berdiri sendiri tidak memiliki pengaruh yang besar namun secara bersama-sama keduanya berpengaruh signifikan pada keputusan investor yang

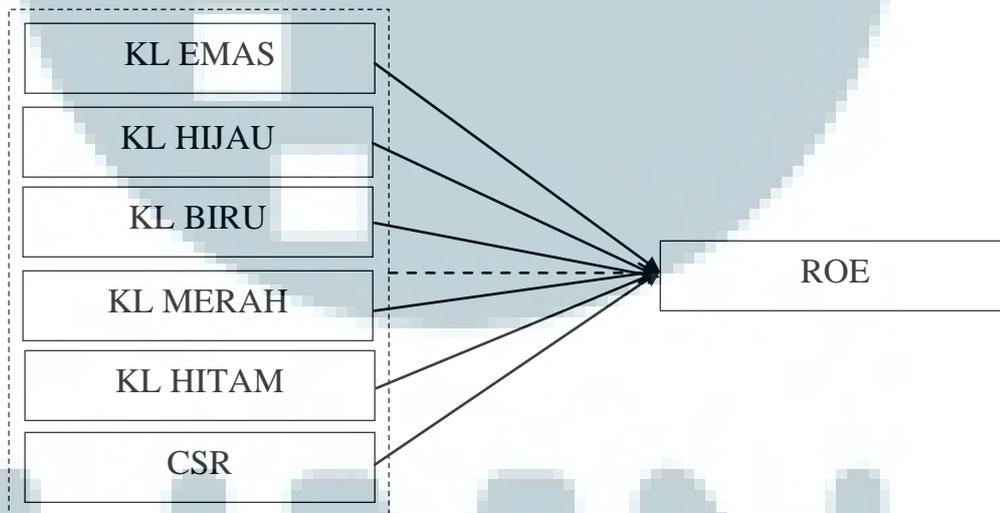
mengacu pada kinerja finansial perusahaan. Penelitian oleh Daud dan Amri (2008) menunjukkan bahwa *CSR* dan *Intellectual Capital* secara simultan berpengaruh terhadap *ROE*.

Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesis alternatif ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>3</sub>: Kinerja lingkungan dan *CSR* secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *ROE*.

## I. Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian



Keterangan:

KL EMAS : Kinerja lingkungan dengan peringkat PROPER Emas

KL HIJAU : Kinerja lingkungan dengan peringkat PROPER Hijau

KL BIRU : Kinerja lingkungan dengan peringkat PROPER Biru

KL MERAH : Kinerja lingkungan dengan peringkat PROPER Merah

KL HITAM : Kinerja lingkungan dengan peringkat PROPER Hitam

CSR : *Corporate Social Responsibility*

ROE : *Return On Equity*

